

Hakikat dan Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia: Dinamika Historis dan Tantangan Sociolinguistik di Era Digital

Ira Yuniati¹, Tuhfah Muslihah¹, Asriana Nur Ameliah¹, Dea Rahayu¹, Nivi Yulia Sapitri¹, Reza Meitista Putri¹

¹Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Corresponding author e-mail: irayuniati@umb.ac.id

Article History: Received on 14 July 2026, Revised on 18 July 2026,
Published on 8 August 2026

Abstrak: Studi ini menganalisis hakikat Bahasa Indonesia sebagai sistem simbol dan identitas kolektif, merekonstruksi dinamika historisnya dari era Melayu Lama hingga penyatuannya sebagai bahasa nasional, dan mengeksplorasi tantangan sociolinguistik kontemporer di era globalisasi dan digitalisasi. Pendekatan penelitian pustaka kualitatif digunakan, menggabungkan analisis historis, analisis isi, dan triangulasi sumber untuk meneliti dokumen kebijakan bahasa dan literatur terkait. Temuan menunjukkan bahwa transformasi Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia mencerminkan keberhasilan rekayasa sociolinguistik yang egaliter dan inklusif, sementara standarisasi korpus pasca-kemerdekaan (PUEBI/EYD) secara efektif membangun integrasi nasional. Namun, di era kontemporer, hegemoni bahasa standar menghadapi tantangan dari hibriditas linguistik yang didorong oleh peralihan kode dan variasi bahasa digital informal di media sosial. Studi ini secara unik mengintegrasikan tiga dimensi penyelidikan—filosofis-konseptual, historis-kronologis, dan sociolinguistik digital—yang umumnya diperlakukan secara terpisah dalam studi sebelumnya, menawarkan analisis komprehensif tentang evolusi dan tantangan kontemporer Indonesia. Studi ini merekomendasikan reorientasi kebijakan dari model sentralistik top-down menuju pendekatan adaptif bottom-up yang responsif terhadap ekologi linguistik modern, tanpa mengorbankan fungsi pemersatu Indonesia. Penelitian ini memberikan kerangka kerja holistik untuk memahami Indonesia sebagai proyek ideologis di negara pascakolonial, menawarkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi para pembuat kebijakan bahasa dalam menavigasi ketegangan antara standarisasi dan keragaman linguistik era digital sambil tetap menjaga kohesi nasional.

Kata Kunci: Bahasa Indonesia, Era Digital, Sejarah Bahasa, Standarisasi Bahasa, Tantangan Sociolinguistik

Abstract: This study analyzes the nature of Indonesian as a system of symbols and collective identity, reconstructs its historical dynamics from the Old Malay era to its unification as a national language, and explores contemporary sociolinguistic challenges in the era of globalization and digitalization. A qualitative library-research approach was employed, combining historical analysis, content analysis, and source triangulation to examine language

policy documents and related literature. The findings reveal that the transformation of Malay into Indonesian reflects successful egalitarian and inclusive sociolinguistic engineering, while post-independence corpus standardization (PUEBI/EYD) effectively built national integration. However, in the contemporary era, the hegemony of standard language faces challenges from linguistic hybridity driven by code-switching and informal digital language variation on social media. This study uniquely integrates three dimensions of inquiry philosophical-conceptual, historical-chronological, and digital sociolinguistic which prior studies have generally treated separately, offering a comprehensive analysis of Indonesian's evolution and contemporary challenges. The study recommends a policy reorientation from a centralistic top-down model toward an adaptive bottom-up approach responsive to modern linguistic ecology, without sacrificing Indonesian's unifying function. This research contributes a holistic framework for understanding Indonesian as an ideological project in a postcolonial state, offering actionable insights for language policymakers in navigating the tension between standardization and digital-era linguistic diversity while preserving national cohesion.

Keywords: *Digital Era, Indonesian Language, Language History, Language Standardization, Sociolinguistics Challenges*

A. Pendahuluan

Bahasa merupakan salah satu penanda paling mendasar dari eksistensi sebuah bangsa. Melalui bahasa, suatu masyarakat tidak hanya berkomunikasi, tetapi juga membangun, mewariskan, dan mengembangkan sistem nilai, pengetahuan, serta identitas kolektifnya. Dalam konteks negara-bangsa modern, bahasa nasional kerap menjadi simbol pemersatu yang mengatasi perbedaan etnis, budaya, dan wilayah geografis. Fenomena ini terlihat jelas pada banyak negara pascakolonial di dunia, di mana proses pembentukan bahasa nasional menjadi bagian tak terpisahkan dari proyek besar pembangunan identitas kebangsaan pascakemerdekaan (Azrul Amirullah dkk., 2025).

Indonesia merupakan salah satu contoh paling menarik dari fenomena tersebut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari tujuh ratus bahasa daerah yang hidup dan digunakan oleh berbagai kelompok etnis, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya menyatukan masyarakatnya yang sangat majemuk. Namun, alih-alih memaksakan salah satu bahasa etnis mayoritas sebagai bahasa nasional sebagaimana terjadi di beberapa negara lain, para pendiri bangsa justru memilih bahasa Melayu yang secara historis telah lama berfungsi sebagai lingua franca perdagangan dan pergaulan antaretnis di kawasan Nusantara untuk diangkat dan dikembangkan menjadi bahasa Indonesia. Pilihan ini terbukti menjadi salah satu keputusan politik-kebahasaan paling berhasil dalam sejarah dunia modern, karena mampu menyatukan bangsa yang sangat beragam tanpa menimbulkan dominasi linguistik salah satu kelompok etnis atas kelompok lainnya (Nasution, 2025).

Untuk memahami bahasa Indonesia secara utuh, diperlukan penelusuran terhadap akar sejarahnya yang panjang. Jauh sebelum menjadi bahasa nasional, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan (*lingua franca*) di kawasan Asia Tenggara sejak masa kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya. Prasasti-prasasti berbahasa Melayu Kuno yang ditemukan di berbagai wilayah Sumatra menjadi bukti bahwa bahasa ini telah memiliki tradisi tulis dan fungsi administratif jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Pada periode berikutnya, penyebaran agama Islam di Nusantara turut memperkaya bahasa Melayu melalui masuknya kosakata Arab dan berkembangnya tradisi penulisan menggunakan aksara Arab-Melayu (Jawi), yang kemudian menjadi media penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan, hukum, dan sastra keagamaan di kepulauan Nusantara (Amirullah dkk., 2026).

Memasuki masa kolonial, bahasa Melayu mengalami dinamika baru seiring dengan kebijakan bahasa yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah kolonial menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa administrasi tingkat rendah untuk berkomunikasi dengan penduduk pribumi, sementara bahasa Belanda tetap dipertahankan sebagai bahasa kekuasaan dan pendidikan tinggi. Di sisi lain, upaya pembakuan ejaan mulai dilakukan, salah satunya melalui Ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901, yang untuk pertama kalinya memberikan sistem penulisan yang lebih sistematis bagi bahasa Melayu di wilayah jajahan Hindia Belanda. Periode ini menjadi penting karena menandai awal mula proses standardisasi bahasa yang kelak menjadi fondasi bagi perkembangan bahasa Indonesia modern (Mirnawanti Pasiru, 2024).

Titik balik yang paling menentukan dalam sejarah bahasa Indonesia terjadi pada awal abad kedua puluh, seiring dengan tumbuhnya kesadaran nasionalisme di kalangan kaum terpelajar pribumi. Melalui Kongres Pemuda II pada tahun 1928, para pemuda dari berbagai latar belakang etnis dan daerah mengikrarkan Sumpah Pemuda yang salah satu poin pentingnya adalah menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Momentum ini secara simbolis mengubah status bahasa Melayu dari sekadar *lingua franca* menjadi bahasa Indonesia, bahasa yang secara sadar dipilih dan diperjuangkan sebagai identitas kebangsaan yang baru. Proses ini kemudian dikukuhkan secara konstitusional setelah kemerdekaan, melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang secara tegas menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara (Jonathan David Susanto dkk., 2020).

Setelah kemerdekaan, perkembangan bahasa Indonesia terus berlanjut melalui berbagai upaya pembakuan dan pengembangan yang dilakukan oleh negara. Pemerintah membentuk lembaga kebahasaan resmi, yang pada mulanya bernama Pusat Bahasa dan kini dikenal sebagai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, untuk menyusun tata bahasa baku, kamus resmi, serta pedoman ejaan yang terus disempurnakan dari masa ke masa, mulai dari Ejaan Republik, Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), hingga Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang berlaku saat ini. Proses pembakuan ini tidak semata-mata bersifat teknis-linguistik, tetapi juga merupakan bagian dari politik bahasa nasional yang bertujuan

menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu sekaligus sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan bangsa.

Memasuki abad kedua puluh satu, bahasa Indonesia menghadapi babak baru dalam perjalanan sejarahnya, yaitu era globalisasi dan digitalisasi yang berlangsung sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat, termasuk cara generasi muda menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena alih kode (code-switching) antara bahasa Indonesia dan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, semakin marak ditemukan dalam percakapan digital, konten media sosial, maupun dunia kerja modern. Selain itu, muncul pula ragam bahasa gaul dan bahasa informal digital yang berkembang sangat cepat, sering kali menyimpang jauh dari kaidah bahasa Indonesia baku. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan akademisi dan pemerhati bahasa mengenai potensi melemahnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan identitas nasional di tengah derasnya arus budaya global.

Di tengah dinamika tersebut, kajian mengenai hakikat bahasa Indonesia menjadi semakin relevan untuk terus dihidupkan kembali. Hakikat bahasa, dalam hal ini, tidak hanya menyangkut definisi teknis bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer dan konvensional, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis yang lebih dalam, yakni bagaimana bahasa Indonesia berfungsi sebagai konstruksi identitas kolektif yang lahir dari proses dialektika sejarah panjang bangsa Indonesia. Pemahaman terhadap hakikat ini penting agar generasi masa kini tidak sekadar memandang bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi teknis semata, melainkan juga sebagai warisan sejarah dan simbol perjuangan kebangsaan yang perlu terus dijaga dan dikembangkan.

Sayangnya, sebagian besar kajian mengenai sejarah bahasa Indonesia yang beredar saat ini masih cenderung bersifat deskriptif-kronologis, yaitu hanya memaparkan urutan peristiwa sejarah tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan pembahasan filosofis mengenai hakikat bahasa itu sendiri. Kajian-kajian tersebut umumnya juga berhenti pada periode pembakuan bahasa pascakemerdekaan dan belum banyak yang secara eksplisit menghubungkan perjalanan historis tersebut dengan tantangan kontemporer yang dihadapi bahasa Indonesia di era digital saat ini. Padahal, pemahaman yang utuh mengenai hakikat dan sejarah bahasa Indonesia sangat diperlukan sebagai landasan berpikir dalam menyikapi berbagai tantangan kebahasaan masa kini, termasuk dalam upaya penguatan literasi kebangsaan dan pembentukan identitas nasional generasi muda.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan tiga dimensi kajian yang selama ini cenderung dibahas secara terpisah, yaitu dimensi filosofis-konseptual mengenai hakikat bahasa sebagai sistem lambang dan identitas kolektif, dimensi historis-kronologis mengenai transformasi bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, serta dimensi sosiolinguistik kontemporer mengenai tantangan digitalisasi. Berbeda

dari kajian-kajian terdahulu yang umumnya berhenti pada salah satu dimensi tersebut secara terpisah, penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang menghubungkan ketiganya secara koheren, sekaligus merumuskan arah reorientasi kebijakan bahasa yang responsif terhadap ekologi linguistik digital tanpa mengabaikan fungsi bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Dengan demikian, kontribusi orisinal penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-sintesis, melainkan juga menghasilkan proposisi kebijakan yang lebih spesifik dan operasional dibandingkan penelitian-penelitian sejenis sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bermaksud mengkaji secara lebih mendalam mengenai hakikat dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia, dengan menghubungkan dimensi filosofis-konseptual mengenai esensi bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa dengan dimensi historis-kronologis mengenai tahapan perkembangannya dari masa lampau hingga era kontemporer. Melalui kajian yang komprehensif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai posisi, fungsi, dan relevansi bahasa Indonesia di tengah tantangan zaman, sekaligus memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian kebahasaan dan penguatan jati diri bangsa Indonesia di masa depan.

B. Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) (Noeng Muhadjir, 2011). Jenis penelitian ini dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini, yaitu hakikat dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia, bersifat konseptual dan historis sehingga data yang diperlukan bersumber dari bahan-bahan tertulis, bukan dari lapangan atau responden secara langsung. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek kajian (Kanggas, 2025).

Selain pendekatan kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (historical approach) untuk menelusuri dan merekonstruksi rangkaian peristiwa perkembangan bahasa Indonesia dari masa ke masa secara kronologis. Pendekatan historis digunakan untuk memahami konteks kesejarahan di balik setiap tahapan perkembangan bahasa Indonesia, mulai dari masa bahasa Melayu Kuno hingga era kontemporer. Pendekatan ini dipadukan dengan pendekatan filosofis-konseptual guna menelaah hakikat bahasa Indonesia secara lebih mendalam, yaitu esensi, fungsi, dan kedudukannya sebagai identitas kolektif bangsa, bukan sekadar rangkaian fakta sejarah semata.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi dokumen-dokumen resmi dan historis yang berkaitan langsung dengan perkembangan bahasa Indonesia, seperti teks Sumpah Pemuda 1928, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 36, pedoman ejaan resmi (Ejaan Van Ophuijsen, Ejaan Republik, Ejaan Yang Disempurnakan, dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia), serta dokumen kebijakan kebahasaan yang diterbitkan oleh lembaga resmi seperti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sumber data sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, ensiklopedia bahasa, dan karya-karya akademik lain yang membahas sejarah bahasa Melayu, sejarah bahasa Indonesia, sosiolinguistik, serta kajian filsafat bahasa yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber sekunder ini digunakan untuk memperkaya, memperkuat, dan memberikan konteks analitis terhadap data primer yang telah dikumpulkan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi atau studi pustaka (*documentary study*), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, membaca, dan mencatat informasi-informasi penting dari berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan: (1) identifikasi sumber, dengan menentukan literatur yang relevan dan kredibel baik berupa dokumen historis, buku akademik, maupun artikel jurnal terindeks; (2) klasifikasi data, dengan mengelompokkan data berdasarkan periode historis dan tema pembahasan, seperti masa Melayu Kuno, masa kolonial, masa pergerakan nasional, masa pascakemerdekaan, dan masa kontemporer; serta (3) pencatatan dan kompilasi data ke dalam kerangka analisis yang telah disusun sebelumnya (Noeng Muhadjir, 2011).

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan metode historis. Metode historis dalam penelitian ini mengikuti empat tahapan klasik, yaitu heuristik (pengumpulan sumber-sumber sejarah), kritik sumber (verifikasi keabsahan dan kredibilitas sumber, baik kritik eksternal maupun internal), interpretasi (penafsiran makna dan keterkaitan antarfakta sejarah yang telah diverifikasi), dan historiografi (penyusunan kembali fakta-fakta tersebut menjadi narasi sejarah yang sistematis dan bermakna). Sementara itu, analisis isi digunakan untuk menelaah makna, konsep, dan gagasan yang terkandung dalam sumber-sumber tertulis terkait hakikat bahasa Indonesia, sehingga diperoleh pemahaman filosofis-konseptual yang mendalam mengenai esensi bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Kedua metode ini digunakan secara terintegrasi,

di mana data historis yang telah tersusun kronologis kemudian dianalisis secara konseptual untuk menemukan keterkaitan antara perkembangan historis bahasa Indonesia dengan hakikat dan maknanya bagi identitas kebangsaan.

Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek silang informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berbeda mengenai peristiwa atau konsep yang sama. Selain itu, peneliti juga mengutamakan penggunaan sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder yang memiliki kredibilitas akademik tinggi, seperti dokumen resmi kenegaraan, terbitan lembaga bahasa, serta artikel jurnal terindeks bereputasi, guna meminimalkan bias interpretatif dan menjaga objektivitas analisis historis-filosofis yang dilakukan (Soekanto, 2014).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hakikat Bahasa Indonesia sebagai Sistem Lambang dan Identitas Kolektif

Bahasa Indonesia merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer dan konvensional, yakni maknanya disepakati secara sosial oleh masyarakat penuturnya, bukan ditentukan oleh hubungan alamiah antara bunyi dan makna. Sebagai identitas komunal dalam berkomunikasi, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebangsaan dan pemersatu berbagai suku bangsa, merefleksikan nilai-nilai sosial budaya yang menjadi perekat kebinekaan bangsa (Misbahuddin, 2020).

Secara teoretis, pemahaman mengenai hakikat bahasa ini dapat dirujuk pada gagasan Ferdinand de Saussure (1916/2011) yang membedakan bahasa sebagai sistem tanda arbitrer (*langue*) dari praktik penggunaannya sehari-hari (*parole*) sebuah dasar penting untuk menjelaskan mengapa kesepakatan sosial menjadi syarat mutlak bagi keberterimaan suatu bentuk kebahasaan. Dalam ranah sosiolinguistik, kerangka Joshua Fishman (1972) mengenai ranah penggunaan bahasa (*domains of language use*) membantu menjelaskan bagaimana bahasa Indonesia beroperasi secara berlapis, baik pada ranah formal-kenegaraan maupun ranah informal-personal, sementara konsep vitalitas bahasa dari David Crystal (2001) memberikan pijakan untuk menilai daya tahan bahasa Indonesia di tengah tekanan bahasa global di ruang digital. Ketiga kerangka ini menegaskan bahwa hakikat bahasa Indonesia tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan sebagai sistem tanda yang hidup, berlapis, dan senantiasa dinegosiasikan oleh penuturnya.

Bahasa Indonesia juga menjadi wadah nilai dan gagasan bersama, sarana transmisi budaya antargenerasi, sekaligus instrumen pemersatu di tengah keberagaman etnis, suku, dan bahasa daerah yang sangat luas di Indonesia. Dalam konteks negara-bangsa yang multikultural, keberadaan bahasa nasional yang kuat menjadi penting agar

tidak muncul fragmentasi identitas kesukuan (primordialisme) akibat ketiadaan bahasa pemersatu. Dengan demikian, kajian ini menjembatani dua dimensi: bahasa Indonesia sebagai objek kajian linguistik formal (sistem lambang) dan bahasa Indonesia sebagai fondasi identitas kebangsaan (jati diri kolektif), yang menjadi pijakan konseptual sebelum masuk ke pembahasan tantangan digitalisasi (Masyita, 2025). Karakteristik inilah yang kelak menjadi pijakan penting untuk memahami mengapa bahasa Indonesia di era digital mengalami pergeseran bentuk, gaya, bahkan norma berbahasa, tanpa serta-merta kehilangan hakikatnya sebagai sistem (Lis Setiawati, 1990). Namun demikian, memahami bahasa Indonesia semata sebagai sistem lambang linguistik belumlah memadai. Bahasa, dalam konteks kehidupan berbangsa, memiliki dimensi yang jauh lebih luas: ia adalah representasi identitas kolektif suatu bangsa. Hakikat bahasa dapat dilihat melalui tiga dimensi utama, yaitu sebagai sistem tanda bermakna yang memuat nilai dan gagasan kolektif bangsa, sebagai wadah penyimpanan dan transmisi budaya antargenerasi, serta sebagai instrumen yang menopang berjalannya tata kelola pemerintahan, pendidikan, hukum, dan pelayanan publik. Ketiga dimensi ini menjadikan bahasa bukan hanya alat komunikasi teknis, melainkan medium tempat suatu bangsa menyimpan memori kolektif, merumuskan cara berpikirnya, dan menegaskan keberadaannya di tengah bangsa-bangsa lain (Noermanzah, 2020).

Dalam konteks Indonesia sebagai negara-bangsa yang secara demografis dan kultural sangat majemuk, fungsi bahasa sebagai perekat identitas kolektif menjadi jauh lebih krusial dibandingkan negara-bangsa yang relatif homogen. Bahasa nasional berfungsi sebagai penanda identitas bangsa sekaligus alat untuk mengintegrasikan berbagai lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang budaya, suku, dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia, dalam hal ini, menjadi medium yang mengikat keberagaman etnis, budaya, dan ratusan bahasa daerah ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang lebih besar. Realitas ini sejalan dengan pandangan bahwa suatu negara akan mengalami kesulitan besar apabila tidak memiliki bahasa pemersatu; bahkan ketika bahasa nasional telah ada namun penggunaannya terpecah-pecah ke dalam bahasa-bahasa kesukuan yang saling terpisah, kondisi tersebut berpotensi memunculkan sikap primordialisme yang mengancam kohesi sosial dan politik bangsa (Kridalaksana, 1993).

Perpaduan antara dimensi sistem lambang dan dimensi identitas kolektif inilah yang menjadikan bahasa Indonesia layak dipahami secara utuh: sebagai artefak linguistik yang tunduk pada kaidah kebahasaan yang bersifat teknis, sekaligus sebagai artefak kebangsaan yang membawa muatan nilai, sejarah, dan kesatuan sosial-politik. Pemahaman hakiki ini menjadi fondasi konseptual yang penting sebelum melangkah pada pembahasan mengenai bagaimana kedua dimensi tersebut diuji dan ditantang oleh gelombang digitalisasi kontemporer, yang membawa perubahan cepat pada bentuk, gaya, bahkan fungsi sosial bahasa itu sendiri. Dengan kata lain, sebelum bahasa Indonesia dapat dinilai bertahan atau tergerus di ruang digital, penting terlebih dahulu untuk menegaskan bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar aturan

tata bahasa, melainkan jati diri kolektif suatu bangsa yang telah lama disemai melalui bahasa itu sendiri.

Dinamika Historis Bahasa Indonesia: Dari Melayu Kuno Hingga Bahasa Pemersatu

Bahasa Indonesia merupakan representasi dari proses evolusi linguistik yang panjang, dinamis, dan adaptif, bukan sekadar konstruksi sosiopolitis yang instan. Secara historis, genealogi bahasa ini berakar pada rumpun bahasa Melayu Kuno yang mengonsolidasikan perannya sejak abad ke-7 Masehi di bawah hegemoni Kerajaan Sriwijaya. Artefak epigrafi berupa Prasasti Kedukan Bukit (683 M) dan Prasasti Talang Tuwo (684 M) mengonfirmasi bahwa varietas bahasa ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen birokrasi internal kerajaan, melainkan juga beroperasi secara luas sebagai lingua franca dalam jaringan perdagangan dan penyebaran agama di kawasan Nusantara. Pada fase embrionik ini, leksikon bahasa Melayu Kuno mengalami peminjaman kosakata (lexical borrowing) yang intensif dari bahasa Sanskerta, sebagai konsekuensi logis dari dominasi kultural Hindu-Buddha yang mengakar kuat di Asia Tenggara.

Memasuki abad ke-14, pergeseran geopolitik yang ditandai oleh disintegrasi Sriwijaya dan penetrasi Islam menstimulasi transisi krusial menuju era Melayu Klasik. Transformasi ini dicirikan oleh metamorfosis ortografi melalui adopsi aksara Jawi (Arab-Melayu) serta asimilasi elemen leksikal dari bahasa Arab dan Persia. Fleksibilitas serta daya serap bahasa Melayu kembali teruji saat gelombang kolonialisme Barat, yang diinisiasi oleh bangsa Portugis dan disusul oleh kongsi dagang Belanda (VOC), mulai mendominasi tata kelola ekonomi-politik Nusantara. Kontak bahasa (language contact) yang terjadi memicu pengayaan kosakata serapan baru, khususnya yang merepresentasikan konsep modernisasi, administrasi birokrasi, pranata hukum, dan teknologi Barat.

Penetapan bahasa Melayu sebagai fondasi bahasa nasional, mengungguli bahasa Jawa yang secara demografis memiliki jumlah penutur mayoritas, merupakan keputusan strategis berbasis pertimbangan sociolinguistik yang komprehensif. Berbeda dengan struktur bahasa Jawa atau Sunda yang memiliki stratifikasi sosiolek yang kompleks (speech levels), bahasa Melayu bersifat egaliter, tidak mengenal tingkatan kasta, dan memiliki aksesibilitas pembelajaran yang tinggi. Karakteristik ini meminimalisasi hambatan komunikasi antar-etnis. Keberadaan bahasa Melayu yang telah berabad-abad mapan sebagai media interaksi di berbagai bandar ekonomi Nusantara turut mempermudah proses akseptabilitasnya. Faktor ini mendorong kelompok-kelompok etnis non-Melayu untuk secara sukarela (voluntary acceptance) mengadopsi bahasa tersebut demi mengeliminasi potensi konflik superioritas kesukuan dan mempercepat integrasi nasional.

Kristalisasi bahasa Melayu menjadi instrumen perjuangan politik mencapai puncaknya pada dinamika pergerakan nasional awal abad ke-20. Peristiwa Sumpah

Pemuda pada 28 Oktober 1928 menandai reorientasi konseptual, di mana bahasa ini secara formal diredefinisi dan dideklarasikan sebagai "Bahasa Indonesia", sebuah simbol pemersatu bangsa yang memayungi pluralitas kultural. Legitimasi yuridis-formal bahasa tersebut kemudian dikodifikasi secara konstitusional pasca-proklamasi kemerdekaan melalui Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara (state language). Secara keseluruhan, dinamika historis ini menegaskan bahwa transformasi bahasa Indonesia dari dialek perdagangan lokal menjadi bahasa persatuan nasional merupakan manifestasi rekayasa sociolinguistik (sociolinguistic engineering) yang sukses dalam merekatkan dan mempertahankan kohesi sosial di tengah keberagaman etnolinguistik yang kompleks.

Untuk memberikan gambaran yang lebih ringkas dan sistematis, tahapan kronologis perkembangan bahasa Indonesia dari masa Melayu Kuno hingga era kontemporer dirangkum pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kronologi Perkembangan Bahasa Indonesia

Periode	Tahun/Abad	Peristiwa Kunci	Signifikansi
Melayu Kuno	Abad ke-7 M	Prasasti Kedukan Bukit (683 M) dan Talang Tuwo (684 M) pada masa Kerajaan Sriwijaya	Bukti tertulis awal bahasa Melayu sebagai bahasa administrasi dan lingua franca perdagangan
Melayu Klasik	Abad ke-13-19	Islamisasi Nusantara dan adopsi aksara Jawi (Arab-Melayu)	Pengayaan kosakata Arab-Persia; media penyebaran ilmu pengetahuan, hukum, dan sastra keagamaan
Kolonial	1901	Ejaan Van Ophuijsen	Standardisasi ejaan pertama bagi bahasa Melayu di Hindia Belanda
Pergerakan Nasional	28 Oktober 1928	Sumpah Pemuda	Bahasa Melayu diikrarkan sebagai bahasa persatuan bernama "Bahasa Indonesia"
Kemerdekaan	1945	Pasal 36 UUD 1945	Bahasa Indonesia dikukuhkan secara konstitusional sebagai bahasa negara
Pasca-kemerdekaan	1947, 1972, 2015	Ejaan Republik, Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), PUEBI	Proses kodifikasi korpus dan standardisasi bahasa yang berkelanjutan
Kontemporer	Abad ke-21	Digitalisasi KBBI Daring; UU No. 24/2009; Perpres No. 63/2019	Adaptasi kebijakan bahasa terhadap tantangan globalisasi dan digitalisasi

Politik Bahasa dan Proses Pembakuan Pasca-Kemerdekaan

Pasca-kemerdekaan, negara-negara pascakolonial menghadapi tantangan ganda, yakni merawat kemajemukan primordial sekaligus membangun identitas nasional yang integratif. Dalam konteks ini, politik bahasa (language politics) bukan sekadar upaya administratif untuk menetapkan alat komunikasi resmi, melainkan instrumen ideologis yang sengaja dikonstruksi oleh elite penguasa untuk melegitimasi

kedaulatan politik. Melalui kacamata hegemoni Gramscian, politik bahasa pasca-kemerdekaan beroperasi dengan menciptakan konsensus kultural, di mana masyarakat secara sukarela mengadopsi identitas linguistik baru demi mewujudkan bayangan komunitas bersama (imagined communities).

Proses pembakuan bahasa (language standardization) yang menyusul proklamasi kemerdekaan merupakan fase teknis-ideologis yang kompleks dan tidak pernah netral-bebas nilai. Mengikuti kerangka Haugen, pembakuan ini melibatkan empat tahapan krusial: pemilihan (selection), kodifikasi (codification), perluasan fungsi (elaboration), dan penerimaan (acceptance). Pada tahap pemilihan dan kodifikasi, lembaga bahasa bentukan negara memegang otoritas penuh untuk menentukan varietas bahasa mana yang dianggap sah, yang pada gilirannya kerap menciptakan polarisasi antara varietas formal yang dilegitimasi negara dan varietas vernakular yang secara sistematis terpinggirkan dari ruang publik (Ratnasari dkk., 2023).

Perluasan fungsi (elaboration) bahasa nasional pasca-kemerdekaan menuntut adanya korpus bahasa yang adaptif terhadap dinamika modernitas, sains, dan teknologi, melalui neologisme dan penyerapan istilah asing secara selektif. Polarisasi antara purisme kebahasaan dan pragmatisme global inilah yang menjadi dialektika utama dalam historiografi pembakuan bahasa Indonesia (Wijaya dkk., 2024). Aspek krusial lainnya adalah kebijakan bahasa di sektor pendidikan formal dan birokrasi pemerintahan: melalui standardisasi kurikulum dan buku teks, negara menegaskan apa yang disebut Bourdieu sebagai pasar linguistik (linguistic market), di mana penguasaan bahasa baku bertindak sebagai kapital budaya (cultural capital) yang menentukan mobilitas sosial vertikal warga negara. Namun, politik bahasa yang sentralistik ini kerap melahirkan resistensi laten dari komunitas linguistik minoritas atau daerah dengan tradisi sastra yang kuat. Ketika bahasa nasional dipaksakan sebagai satu-satunya identitas tunggal, ia berisiko memicu kecemburuan etnolinguistik dan mengancam eksistensi bahasa-bahasa ibu. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembakuan korpus yang tidak selaras dengan pengakuan status (status planning) bahasa-bahasa daerah dapat mendelegitimasi proyek integrasi nasional yang semula dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Pada era kontemporer, hasil dari proses pembakuan bahasa pasca-kemerdekaan tersebut menghadapi tantangan baru akibat arus globalisasi dan digitalisasi (Badad Alauddin dkk., 2025). Bahasa baku yang telah mapan dan kaku kini berbenturan dengan kelenturan komunikasi digital serta hibriditas bahasa generasi muda. Kontrol negara terhadap batas-batas linguistik yang dulunya kokoh melalui lembaga bahasa kini mulai mengendur akibat demokratisasi media sosial (Prayogi dkk., 2024). Situasi ini memaksa adanya reorientasi dalam sosiolinguistik kritis untuk melihat apakah bahasa baku pasca-kemerdekaan mampu mempertahankan relevansinya tanpa harus bersikap represif terhadap varietas-varietas bahasa non-standar. Secara teoretis, konstruksi bahasa nasional adalah proses historis yang dinamis dan tidak pernah selesai (unfinished project); keberhasilan jangka panjangnya tidak diukur dari

seberapa ketat tata bahasa dikodifikasi, melainkan dari seberapa inklusif bahasa tersebut mampu menampung pluralitas identitas dan suara warga negaranya (Sulistya A dkk., 2025).

Bahasa Indonesia di Era Kontemporer: Antara Tantangan Digitalisasi dan Penguatan Jati Diri

Kemajuan pesat teknologi digital turut mengubah corak pemakaian bahasa Indonesia dalam komunikasi keseharian, terutama di berbagai kanal media sosial dan aplikasi percakapan daring. Praktik peralihan kode maupun pencampuran kode antara bahasa Indonesia dan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, kian marak terjadi seiring arus informasi global yang mengalir tanpa sekat wilayah. Di samping itu, bermunculan pula variasi bahasa gaul dan berbagai bentuk singkatan tidak baku sebagai buah budaya digital kaum muda; meski hal ini menambah dinamika kreatif dalam berbahasa, di sisi lain ia berisiko melunturkan kaidah kebahasaan yang baku. Mekanisme algoritma media sosial yang lebih mengutamakan konten ringkas, instan, dan mudah viral turut membentuk pola pikir serta cara berbahasa masyarakat, sehingga pemakaian bahasa Indonesia yang tertata dan mendalam berangsur tergeser oleh kecenderungan serba cepat tersebut.

Sebagai ilustrasi konkret, fenomena hibriditas linguistik ini tampak pada penggunaan istilah seperti “healing” untuk menggambarkan aktivitas relaksasi, “julid” untuk mengomentari secara sinis, atau singkatan seperti “gws” (get well soon) dan “btw” (by the way) yang lazim dijumpai dalam unggahan media sosial generasi muda. Demikian pula, praktik alih kode dalam konten video pendek di berbagai platform berbagi video kerap mencampurkan struktur kalimat bahasa Indonesia dengan kosakata bahasa Inggris secara spontan, mencerminkan apa yang disebut Fishman (1972) sebagai pergeseran ranah penggunaan bahasa dari domain formal ke domain rekreasional-digital.

Fenomena ini memerlukan analisis yang lebih kritis, bukan sekadar deskriptif. Di satu sisi, hibriditas bahasa dapat dipandang sebagai bentuk kreativitas linguistik yang alamiah dan tidak serta-merta mengancam eksistensi bahasa Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian mengenai transformasi budaya digital di Indonesia yang justru memperkaya kosakata dan fleksibilitas komunikasi masyarakat (Badad Alauddin dkk., 2025). Di sisi lain, ketiadaan literasi kebahasaan yang memadai berpotensi melemahkan penguasaan kaidah bahasa baku, khususnya pada ranah pendidikan dan administrasi formal, sehingga terjadi kesenjangan kompetensi berbahasa antara ranah digital dan ranah akademik-birokratis. Kondisi inilah yang menuntut adanya kebijakan bahasa yang tidak represif, namun tetap memastikan penguasaan bahasa baku sebagai fondasi literasi kebangsaan generasi muda.

Menghadapi gempuran tantangan digital semacam itu, upaya memperkuat jati diri bahasa Indonesia menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan. Bahasa Indonesia bukan

semata sarana berkomunikasi, tetapi juga lambang identitas kolektif bangsa yang tumbuh dari semangat Sumpah Pemuda 1928 dan diteguhkan kedudukannya sebagai bahasa negara melalui Pasal 36 UUD 1945. Nilai identitas kebahasaan ini memuat aspek sejarah, kejiwaan, dan sosial yang menyatukan keberagaman suku dan budaya di seluruh Nusantara ke dalam satu wadah kebangsaan. Karena itu, pengaruh kuat bahasa asing dan ragam bahasa digital sepatutnya tidak dimaknai sebagai ancaman yang harus dijaui sepenuhnya, melainkan sebagai persoalan yang perlu disikapi secara luwes, tanpa menghilangkan peran bahasa Indonesia sebagai pemersatu identitas bangsa (Wijaya dkk., 2024).

Sebagai respons atas dinamika tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) di bawah pemerintah telah menempuh sejumlah langkah kebijakan, antara lain penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam bentuk digital, penciptaan aplikasi pemeriksa ejaan, serta gerakan “Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarkan Bahasa Daerah, Kuasai Bahasa Asing” guna menyelaraskan tuntutan modernisasi dengan upaya menjaga identitas kebahasaan. Sejumlah aturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 mengenai Penggunaan Bahasa Indonesia, menjadi dasar hukum agar pemakaian bahasa Indonesia yang benar tetap diutamakan di ranah formal, sekalipun penerapannya di dunia digital dan media sosial masih menemui hambatan pengawasan yang rumit (Leatemia dkk., 2026).

Dengan demikian, persoalan digitalisasi dan penguatan jati diri bahasa Indonesia sejatinya bukanlah dua hal yang saling berlawanan, melainkan dua aspek yang mesti dikelola bersamaan secara seimbang. Diperlukan langkah-langkah strategis yang kontekstual agar bahasa Indonesia tetap mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar jati dirinya, misalnya melalui penanaman literasi digital berbasis kebahasaan sejak dini, penguatan konten kreatif berbahasa Indonesia baku di media sosial, serta sinergi antara pemerintah, kalangan akademisi, dan penyedia platform digital dalam merumuskan kebijakan bahasa yang tanggap zaman. Pada akhirnya, masa depan bahasa Indonesia di era kontemporer amat bergantung pada kesadaran bersama seluruh komponen bangsa untuk memposisikan bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi praktis, melainkan juga cerminan jati diri dan kedaulatan bangsa di tengah derasny arus globalisasi digital (Masyita, 2025).

Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan di Era Digital

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik dan operasional dibandingkan kajian-kajian deskriptif sebelumnya. *Pertama*, penguatan literasi kebahasaan digital sejak jenjang pendidikan dasar, melalui integrasi materi tata bahasa baku dengan simulasi komunikasi digital agar peserta didik mampu membedakan konteks penggunaan bahasa formal dan

informal. *Kedua*, penguatan konten kreatif berbahasa Indonesia baku di platform media sosial melalui kolaborasi antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan kreator konten dan penyedia platform digital, sehingga konten berkualitas dalam bahasa baku dapat bersaing dengan konten berbahasa campuran. *Ketiga*, pengembangan aplikasi dan basis data bahasa (seperti KBBI Daring dan aplikasi pemeriksa ejaan) yang lebih adaptif terhadap perkembangan kosakata baru, tanpa menghilangkan fungsi normatifnya sebagai rujukan baku. *Keempat*, sinergi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan penyedia platform digital dalam merumuskan pedoman etika berbahasa digital yang kontekstual, sebagai alternatif dari pendekatan larangan yang cenderung tidak efektif diterapkan di ruang digital.

D. Kesimpulan

Bahasa Indonesia pada hakikatnya bukan sekadar instrumen komunikasi teknis atau sistem lambang bunyi yang arbitrer, melainkan sebuah artefak kebangsaan dan proyek ideologis yang berfungsi sebagai perekat identitas kolektif di tengah pluralitas etnolinguistik Nusantara. Perjalanan sejarah membuktikan bahwa transformasi bahasa Melayu dari era Melayu Kuno zaman Sriwijaya, Melayu Klasik, hingga masa kolonial menjadi bahasa Indonesia merupakan bentuk rekayasa sosiolinguistik (sociolinguistic engineering) yang sangat sukses. Dipilihnya bahasa Melayu didasarkan pada pertimbangan sosiolinguistik yang matang, karena sifatnya yang egaliter, tidak mengenal stratifikasi sosial, dan telah mapan sebagai lingua franca. Faktor-faktor inilah yang memicu penerimaan secara sukarela (voluntary acceptance) oleh berbagai kelompok etnis non-Melayu, sehingga mampu meminimalisasi konflik superioritas kesukuan dan mempercepat integrasi nasional yang kemudian dikristalisasi melalui Sumpah Pemuda 1928 dan dilegitimasi oleh Pasal 36 UUD 1945.

Pasca kemerdekaan, politik bahasa dan proses pembakuan korpus melalui institusi resmi serta pedoman ejaan (seperti EYD dan PUEBI) berhasil menegaskan apa yang disebut sebagai pasar linguistik (linguistic market). Dalam konteks ini, penguasaan bahasa baku bertindak sebagai kapital budaya yang menentukan mobilitas sosial vertikal warga negara sekaligus memperkuat kohesi sosial. Namun, pada era kontemporer, hegemoni bahasa baku tersebut menghadapi tantangan besar akibat arus globalisasi dan digitalisasi. Demokratisasi media sosial dan mekanisme algoritma komunikasi digital telah melahirkan fenomena hibriditas linguistik yang masif, seperti maraknya alih kode (code switching), pencampuran kode, serta meluasnya ragam bahasa informal digital di kalangan generasi muda yang sering kali mengendurkan batas-batas norma kebahasaan yang kaku.

Sebagai langkah antisipatif, tantangan digitalisasi dan penguatan jati diri bahasa tidak boleh dipandang sebagai dua kutub yang saling berlawanan, melainkan harus dikelola secara adaptif dan seimbang. Upaya pemerintah melalui digitalisasi kamus (KBBI) dan kampanye Trigatra Bangun Bahasa menjadi fondasi penting untuk menjaga relevansi bahasa nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan

eksistensi bahasa Indonesia di masa depan memerlukan reorientasi kebijakan kebahasaan yang fundamental. Perencanaan bahasa harus mulai bergeser dari model top-down yang sentralistik dan hegemonik menuju pendekatan bottom-up yang lebih inklusif dan responsif terhadap ekologi linguistik modern (linguistic ecology), sehingga bahasa Indonesia tetap mampu mempertahankan fungsinya sebagai pemersatu bangsa tanpa harus bersikap represif terhadap dinamika kreatif di ruang digital. Keterbatasan penelitian ini adalah belum dilakukannya analisis empiris terhadap data kebahasaan aktual di media sosial, karena penelitian ini bersifat konseptual-historis berbasis studi pustaka; oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan korpus digital dan analisis wacana media sosial sangat direkomendasikan untuk mengonfirmasi dan memperkaya temuan konseptual dalam kajian ini.

E. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan jurnal artikel ini. Kami hanya berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang membutuhkan.

Referensi

- Amirullah, M. A., Mubarak, M. R., & At-Tsani, M. (2026). Pembentukan tradisi ilmiah dalam Islam dan hubungannya dengan worldview Islam dalam pandangan Muhammad Naquib Al-Attas. *Journal of Islamic Studies*, 5(1).
- Azrul Amirullah, M., Mubarak, M. R., & Tsani, M. (2025). Role of schools in shaping morality and controlling social deviance in society. *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia*, 6(2), 129–139. <https://doi.org/10.59784/glosains.v6i2.636>
- Badad Alauddin, M., Fitri, D., & Apri Wenando, F. (2025). Tradition to technology: The transformation of Indonesian culture in the social media era. *Asian Journal of Media and Culture*, 1(1), 1–21. <https://doi.org/10.63919/ajmc.v1i1.16>
- Crystal, D. (2001). *Language and the Internet*. Cambridge University Press.
- Fishman, J. A. (1972). *The sociology of language: An interdisciplinary social science approach to language in society*. Newbury House.
- Jonathan David Susanto, Pinori, J. Y., & Karwur, G. (2020). Implikasi pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law dari perspektif hukum tata negara. *Lex Administratum*, 8(2), Fakultas Hukum UNSRAT.
- Kanggas, F. Z. H. (2025). *Metode Penelitian Hukum Islam*. UNIDA Press.
- Kridalaksana, H. (1993). *Kamus Linguistik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Leatemala, M. E., Koritelu, P., & Pelupessy, P. J. (2026). Beyond cultural persistence: Decolonizing identity through local-global encounters in an island society of

- Eastern Indonesia. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 3(3), 745–764. <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol3iss3pp745-764>
- Lis Setiawati. (1990). *Hakikat Bahasa*. Pateda.
- Masyita, A. R. (2025). Bahasa sebagai wahana pembentukan identitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. *Jurnal Kajian Bahasa dan Budaya*, 4(1), 22–31.
- Mirnowanti Pasiru. (2024). Sejarah perkembangan dan kedudukan bahasa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Mosikolah*, 4(1), 15–24.
- Misbahuddin, M. (2020). Fungsi, hakikat dan wujud bahasa. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 3(2), 55–64.
- Nasution, N. H. A. (2025). Sejarah dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. *Jurnal Kebahasaan Nusantara*, 2(1), 10–19.
- Noeng Muhadjir. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Noermanzah. (2020). Bahasa Sebagai Alat Komunikasi, Citra Pikiran, Dan Kepribadian. *Open Science Framework*, <https://doi.org/10.31219/osf.io/ez6dk>
- Prayogi, R., Sapriya, S., Adam, M. J. I., & Nurgiansah, T. H. (2024). Model of civic education as moral education. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 5(1), 43–51. <https://doi.org/10.21154/asanka.v5i1.8353>
- Ratnasari, D., Sidiq, F., & Kalfin. (2023). Soméah culture as a shaper of brand personality in Sundanese ethnic society: Implications of personal branding and cultural transactions. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*, 1(3), 36–39. <https://doi.org/10.46336/ijhlp.v1i3.30>
- Saussure, F. de. (2011). *Course in general linguistics* (W. Baskin, Trans.; P. Meisel & H. Saussy, Eds.). Columbia University Press. (Original work published 1916)
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Sulistya A, A., Hadiaty Y, S., & Kalfin. (2025). Cultural identity in digital broadcasting in Indonesia: Challenges and opportunities in the era of globalization. *International Journal of Linguistics, Communication, and Broadcasting*, 2(4), 116–120. <https://doi.org/10.46336/ijlcb.v2i4.156>
- Wijaya, M. M., Tsabita, N. B., & Dewadi, F. M. (2024). Challenges of Indonesian defense resilience in the face of contemporary technology advancement: What's next? *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 235–250. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.434>